

ABSTRAK

Dalam tesis ini meneliti tentang penolakan pelayanan jasa Notaris terhadap klien dalam hal pembuatan Akta Autentik. Fokus permasalahan yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini yaitu, *pertama*: pertimbangan Notaris dalam menolak memberikan pelayanan jasa terhadap klien dalam hal pembuatan Akta Autentik di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, *kedua*: tolak ukur penolakan pelayanan jasa Notaris sehingga dapat dikenakan sanksi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis-empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa, *pertama*, pertimbangan Notaris dalam menolak memberikan pelayanan jasanya adalah: karena tidak lengkapnya persyaratan yang dibutuhkan, para pihak mempunyai itikad tidak baik, akta yang akan dibuat bertentangan dengan undang-undang serta norma-norma dalam masyarakat, akta yang akan dibuat bertentangan dengan sumpah jabatan Notaris, akta yang akan dibuat bertentangan dengan hati nurani Notaris, ketidakmampuan Notaris untuk membuat akta tersebut. *Kedua*: tolak ukur penolakan pelayanan jasa oleh Notaris yang dapat dikenakan sanksi adalah apabila penolakan yang dilakukan tidak memiliki alasan hukum atau alasan yang mendasar yang bisa dipertanggung jawabkan dalam melakukan penolakan tersebut. Saran untuk Notaris bahwasanya dalam setiap pembuatan akta harus mengacu pada undang-undang dan kode etik Notaris, kemudian saran untuk masyarakat yang merasa dirugikan karena penolakan jasa yang dilakukan Notaris bisa melaporkan ke Majelis Pengawas Daerah.

Kata Kunci :Notaris, pelayanan jasa, Akta Autentik.

ABSTRACT

In this thesis examines the rejection of services of Notaries to clients in terms of making an authentic deed. The focus of the problem that is the object of study in this study are, first: Notary consideration in refusing to provide services to clients in terms of making an Authentic Deed in the City of Yogyakarta and Sleman Regency, second: a benchmark for refusing Notary services so that they may be subject to sanctions.

This type of research used in this study is a juridical-empirical study, using a statutory approach, conceptual approach and sociological approach with qualitative data analysis methods. This study found that, first, the Notary's consideration in refusing to provide his services was: due to incomplete requirements needed, the parties had bad intentions, the deed to be contradicted with the laws and norms in society, the deed that would made contrary to the oath of office of the Notary, the deed to be made contrary to the conscience of the Notary, the inability of the Notary to make the deed. Second: a benchmark for refusal of services by a notary that can be subject to sanctions is if the refusal made does not have a legal reason or a fundamental reason that can be accounted for in making the refusal. Suggestions for Notaries that in making any deed must refer to the law and the Notary's code of ethics, then suggestions for people who feel disadvantaged because of the denial of services performed by Notaries can report to the Regional Supervisory Council.

Keywords: Notary, service, Authentic Deed.

